

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran air dan udara disekitar.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Khususnya Pasal 4 dan pasal 5 diatur kebijakan dan strategi pemerintahan dalam melakukan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan tantangan bagi para pengelola perkotaan. Bahkan didalam peraturan perundang-undangan terdapat

isi bentuk hukum yang tidak sinkron dengan isi bentuk hukum baik secara vertikal juga dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat ini. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.

Untuk mengefektifkan pengelolaan sampah di pedesaan dan perkotaan atau tiap daerah masing-masing dikeluarkan lah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah tidak lagi oleh pemerintah pusat melainkan harus dikelola oleh daerahnya masing-masing.

Besarnya jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi mengakibatkan besarnya volume (produksi) sampah yang ditimbulkan setiap hari. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, pada tahun 2018 total produksi (timbulan) sampah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di Kabupaten Bekasi mencapai 1200 ton perharinya. Dalam mengatasi permasalahan sampah padat, Kabupaten Bekasi dan masih menggunakan sistem konvensional yaitu dikumpulkan di beberapa titik pengumpulan atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kemudian diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.

TPA yang belum sepenuhnya menerapkan UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu TPA Burangkeng yang terletak di Kabupaten Bekasi. Karena TPA Burangkeng masih menggunakan metode *Open Dumping*. Metode yang digunakan pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini dinilai belum maksimal

karena dapat menimbulkan eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat sekitar.

TPA yang terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi ini sudah sejak lima tahun lalu *over load* alias penuh. Selama ini pembuangan sampah di Burangkeng selalu dipaksa-paksa. Meski sudah padat, tetap juga harus dipadat-padatkan. Keberadaan TPA Burangkeng yang sebenarnya sudah sangat *over load* tersebut, sementara itu, tumpukan sampah yang hampir 30 meter berdiri di TPA seluas 11,8 Ha tersebut sudah ada sejak 25 tahun lalu. Sementara tidak ada TPA lainnya yang dimiliki Kabupaten Bekasi, membuat TPA Burangkeng terpaksa masih menjadi satu-satunya pusat pembuangan sampah Kabupaten Bekasi, TPA Burangkeng bahwa menerima sampah 1.500 ton sehari, sedangkan yang dapat ditampung 750 ton.

Akibat menumpukan sampah dan *over load* ini mengakibatkan, masalah kualitas sumur atau air bersih yang memburuk, produktivitas tanaman di lahan pertanian sekitar yang menurun, serta lingkungan hidup yang kurang nyaman menjadi dampak lain yang dirasakan oleh warga setempat yang tinggal di dekat TPA Burangkeng. TPA Burangkeng juga menyebabkan masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, diare, influenza, penyakit kulit, dan ISPA sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya pencegahan dan biaya untuk berobat.

Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang ada di Kabupaten Bekasi dengan turunnya nilai dalam penilaian Adipura Se-jawa Barat tahun 2014 dari 71 poin merosot hingga 64,8 poin menurut kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(BLPH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pemerintah menilai merosotnya penilaian Adipura 2015 di wilayah itu turut dipicu oleh sistem pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih lemah. Maka dari itu Kabupaten Bekasi berada di urutan tiga terendah atau ke-22 dari 25 Kota/Kabupaten. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Karena seharusnya sampah rumah tangga yang masih menumpuk dipermukiman penduduk dan jalan-jalan utama serta sampah pasar-pasar di Bekasi harus sudah diangkut hingga pukul 08.30 WIB banyak faktor yang menjadi kendala, mengapa sampah-sampah masih menumpuk dipermukiman terbuka. Salah satunya adalah minimnya alat transportasi pengangkut sampah. Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bekasi, sehingga pembelian truk sampah belum dapat terlaksana. Dengan demikian, masih banyak sampah pasar dan sampah perumahan yang belum diangkut seluruhnya, kondisi ini semakin diperparah dengan menumpuknya sampah perumahan saat musim hujan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, produksi sampah di Kabupaten Bekasi mencapai 1.500 ton perharinya, truk sampah masih berjumlah 34 unit dan idealnya mencapai 300 unit truk sampah. Kekuatan satu armada truk sampah berkisar 6 meter kubik. Rata-rata keluarga membuang sampah 1,5 kilogram per hari. Perkiraan, satu mobil truk sampah hanya mampu menampung sampah dari 144 kepala keluarga (KK). Padahal, tiap-tiap kecamatan mempunyai puluhan, bahkan ratusan kompleks perumahan. Idealnya 300 armada untuk bisa meng *cover* sampah-sampah yang ada di wilayah perkotaan.

Gambar 1.1 Jumlah Timbunan Sampah 2018

[illegible]

Sumber : TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi, 2018

Perda ini adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh Permendagri No 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Seharusnya Undang-undang dan Permendagri tersebut sudah memberikan muatan pokok yang penting kepada Pemerintah Daerah, yaitu landasan yang lebih kuat bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dari aspek legal formal kejelasan tentang pembagian tugas dan peran para pihak terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat landasan operasional dalam implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sampah namun fasilitas yang disediakan tidak termanfaatkan dengan baik dan kerjasama yang dilakukan tidak pada satu atap. Ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakannya.

Tabel 1.1 Komposisi Sampah Kabupaten Bekasi

No	Jenis	Sumber	Persentase
1	Non Organik	Plastik	9%
		Kertas	6%
		Gelas	1%
		Kayu	1%
		Kain	2,4%
		B3	0,1%
		Logam	1%
		Bongkahan	1%
		Lain-lain	7%
2	Organik	Rumah Tangga	74%
		Pasar	8,5%
		Kegiatan Komersil	18%
		Kegiatan Industri	15%
		Taman, Jalan, Sungai	3,1%

Sumber: TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi, 2018

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa presentasi sumber sampah di Kabupaten Bekasi tertinggi yang berasal dari jenis non organik yaitu bersumber dari plastik sebesar 9%. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa plastik paling sering digunakan oleh masyarakat karena selain mudah didapatkan,

juga merupakan salah satu bentuk yang paling sederhana dan banyak memberikan manfaat. Sedangkan presentase sumber sampah tertinggi yang berasal dari jenis organik yaitu bersumber dari rumah tangga sebesar 74%. Hal ini juga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa sampah pada umumnya bersumber dari sisa-sisa pemakaian suatu produk rumah tangga.

Hal ini disebabkan karena TPA Burangkeng dari sebelum diberlakukan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya Dan Beracun sampai diberlakukannya Perda Kabupaten Bekasi (sampai saat ini), masih menerapkan sistem *open dumping* yaitu dimana pembuangan sampah yang dilakukan begitu saja di lahan terbuka tanpa dilakukan upaya pemadatan sampah atau penutupan dengan tanah dan tanpa dilengkapi dengan fasilitas pencegahan pencemaran lingkungan. Sistem *open dumping* ini, sampah hanya dibiarkan begitu saja didiamkan secara otomatis terurai dengan sendirinya, tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Yang dimana sistem *open dumping* ini sangat membutuhkan lahan yang cukup luas agar mampu menampung seluruh sampah yang ada.

Gambar 1.2 Skematik Persampahan



Sumber: TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi, 2018

Sistem *open dumping* ini sangat rentan terjadinya kebakaran dan pencemaran air tanah karena tidak terkendali dengan sistem pengendalian gas metana (CH_4) dan lindi (*leachate*) atau air sampah, tumpukan sampah yang dibiarkan saja bisa mengakibatkan kebakaran karena terkena panasnya trik matahari sehingga gas metana yang dihasilkan dari sampah tersebut mudah meledak sehingga dapat menimbulkan pencemaran udara, selain bau sampah yang di timbulkan.

Tidak adanya pengembangan pengelolaan sampah untuk pemanfaatan kembali sampah. Pemanfaatan sampah ini juga merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengurangan sampah. Melihat dari tabel diatas bahwa sampah organik paling banyak dihasilkan sebesar 74%, dan juga bahwa sampah organik ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan kembali dan pemanfaatan sampah dapat dilakukan melalui proses *reduce*, *reuse* dan *recycle*. Adapun pengurangan sampah melalui program 3R di Kabupaten Bekasi hingga kini sebesar 13%. Menunjukan

pemanfaatan sampah ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena disebabkan oleh beberapa hal karena belum diterapkannya teknologi pengolahan sampah (*composing*) di TPA Burangkeng, dan Pemerintah kurang memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga pengetahuan mereka tentang pengelolaan sampah menjadi minim serta tidak mampu memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak bisa berbuat banyak terkait *over* kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Sebab terkendalanya dengan tata ruang, padahal terdapat ketersediaan lahan dengan seluas 11,8 hektar disekitar lokasi untuk diekspansi untuk menjadi TPA. Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup sudah beberapa kali merencanakan pengajuan pembebasan lahan. Namun demikian adanya masalah ketidak sesuaian tata ruang menjadi faktor penghambat perluasan kawasan di TPA Burangkeng tersebut. Banyak faktor lain yang disebabkan dari *over load* tersebut, sampah-sampah di TPA Burangkeng tidak kuat menampung sampah lebih banyak lagi hingga banyak sampah-sampah yang berserakan tidak tertata dengan rapih hingga banyak keresahan warga sekitar TPA Burangkeng yang tidak nyaman dengan bau nya dan bisa mencemarkan lingkungan, air, hingga udara, serta banyak masyarakat sekitar terkena penyakit yang disebabkan dari sampah yang *over load* tersebut.

Sebagaimana dikatakan di dalam Q.S.Al-A'raf ayat 56-58 tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقًا لَا تُسْقِنُهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۖ وَيَادِّنُ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا
نَجَسًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (56)

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (57)

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.(58)

Pada Q.S.Al-A'raf ayat 56-58 menerangkan bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan, Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi, Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain. Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hambanya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat Nya. Angin yang membawa awan tebal, di halau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk

yang menderita lapar dan haus. Lalu dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut membuktikan bahwa pemerintah kurang optimal dalam menangani permasalahan sampah di TPA Burangkeng sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

”Implementasi Kebijakan Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Kasus Di Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Bekasi)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih diterapkannya sistem pemusnahan sampah dengan *Open Dumping* yang tidak ramah lingkungan karena sampah dibiarkan begitu saja di lahan terbuka tanpa dilakukan upaya penanganan lebih lanjut.
2. Tidak adanya pengembangan pengelolaan sampah untuk memanfaatkan sampah dalam upaya mengurangi beban TPA Burangkeng.

3. Sumber daya manusia yang belum memadai karena masih kurangnya tenaga kerja yang handal dalam memperbaiki alat-alat berat pengangkut sampah dan belum adanya tenaga kerja untuk pengelolaan kompos.
4. Pengelolaan tata ruang TPA Burangkeng yang belum memadai karena kebebasan lahan yang belum terpenuhi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi, bagaimana implementasi kebijakan izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun di tempat pembuangan akhir Burangkeng dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun di tempat pembuangan akhir Burangkeng dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Bekasi.

E. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat secara teoretis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikir bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya.
- 2) Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya setiap hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa kita kembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan sehingga Pemerintah maupun Swasta dapat meningkatkan kembali peranannya dalam pengelolaan sampah.
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di TPA Burangkeng dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

F. Kerangka Pemikiran

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi di kota-kota besar akibat pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat. Ironisnya, permasalahan sampah yang sering muncul selama ini, tidak membuat seluruh *stakeholder* yang bertanggung jawab memiliki kepekaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak jarang di beberapa kota bahkan instansi yang bertugas dalam penanganan sampah kurang mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif bahkan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan karena teknik pengelolaannya yang tidak ramah lingkungan seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, pemerintah kurang mampu mengatasi penanganan sampah di TPA Burangkeng, sehingga pengelolaannya selama ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena sistem pemusnahan sampah yang tidak ramah lingkungan, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, belum diterapkannya teknik pengelolaan sampah, dan sumber daya manusia yang belum memadai, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi upaya pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bekasi dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah di TPA Burangkeng.

Kebijakan Publik menurut Fredrich dalam Agustino (2014 : 7) adalah Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

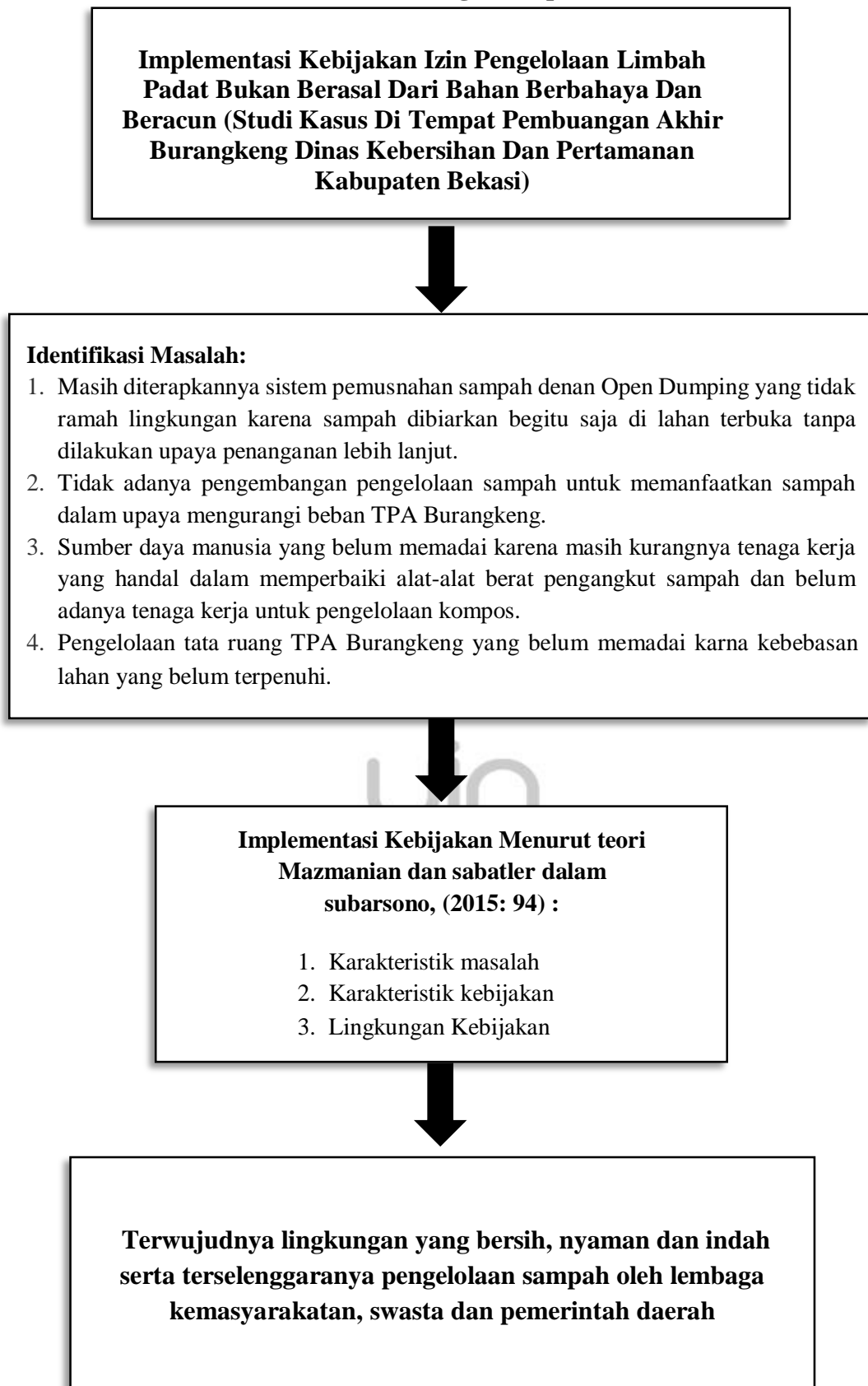
kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut teori Mazmanian dan Sabatler dalam Subarsono (2014: 94) ada 3 indikator dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau aturan yang telah diterapkan yaitu:

1. Karakteristik masalah yang secara garis besar menjelaskan tentang mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, indikatornya terdiri dari kelompok sasaran dan ruang lingkup perubahan perilaku.
2. Karakteristik kebijakan yang secara garis besar menjelaskan tentang kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi. Indikatornya terdiri dari kejelasan dan konsistensi tujuan, sumber daya, akses formal pihak luar, keterpaduan hirarki badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan aturan keputusan dari badan pelaksana.
3. Karakteristik lingkungan kebijakan yang secara garis besar menjelaskan tentang variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi indikatornya terdiri dari kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap dan sumber yang dimiliki masyarakat, serta komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana.

Adapun struktur kerangka berpikir yang peneliti buat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir



G. Proposisi

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah serta kerangka pemikiran, penulis merumuskan proposisi sebagai berikut: implementasi kebijakan izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun di tempat pembuangan akhir Burangkeng dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Bekasi, apabila dilakukan dengan baik, jelas sesuai dengan harapan, dengan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Tetapi jika implementasi kebijakan izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun di tempat pembuangan akhir Burangkeng dinas kebersihan dan pertamanan Kabupaten Bekasi, tidak dilakukan dengan baik, maka tidak sesuai dengan harapan, dengan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.

